

Nama : Lusi Yana Agustina

NPM : 2313031069

Kelas : C

Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Pertemuan 13

KASUS 2

Pemerintah Provinsi Nusantara menerapkan sistem e-Government bernama "IzinCerdas" untuk memproses seluruh jenis perizinan usaha dan bangunan secara berani. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi.

Namun, laporan Ombudsman menyebutkan bahwa:

- Terjadi keterlambatan rata-rata 10 hari dalam penerbitan izin.
- Banyak izin yang tidak jelas statusnya dalam sistem.
- Ditemukan praktik pencahayaan meskipun sistem digital sudah diterapkan.

Pertanyaan:

1. Tunjukkan bagaimana Anda akan menyusun audit kinerja berbasis risiko untuk memancarkan sistem IzinCerdas , serta bagaimana Anda dapat menggunakan teknologi digital dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan kelemahan sistem .

Jawaban:

Penyusunan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Sistem “IzinCerdas”

Audit kinerja berbasis risiko bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan integritas sistem IzinCerdas dengan fokus pada area yang memiliki potensi risiko tertinggi terhadap kegagalan pelayanan publik. Proses audit dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Perencanaan Audit dan Identifikasi Risiko Utama

- Menetapkan tujuan audit: menilai kinerja sistem dalam aspek kecepatan layanan, transparansi proses, dan integritas pegawai.
- Mengidentifikasi risiko utama, antara lain:
 - *Risiko operasional*: keterlambatan penerbitan izin karena bottleneck pada proses verifikasi.
 - *Risiko sistem*: status izin tidak diperbarui akibat integrasi data yang lemah antar unit.
 - *Risiko fraud/pencatutan*: adanya penyalahgunaan akses atau manipulasi data meskipun sistem digital sudah diterapkan.
 - *Risiko kepatuhan*: ketidaksesuaian antara prosedur digital dan regulasi perizinan.

2. Penilaian dan Pemetaan Risiko (Risk Assessment)

- Menentukan tingkat kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*impact*) dari setiap risiko.
- Menggunakan risk matrix untuk menentukan prioritas audit, dengan fokus utama pada risiko tinggi seperti keterlambatan izin dan potensi penyimpangan.
- Menyusun *risk register* sebagai dasar untuk menetapkan area audit kritis.

3. Pelaksanaan Audit dan Analisis Data

- Melakukan *data analytics* pada log sistem, waktu proses izin, dan pola akses pengguna untuk mendeteksi anomali.

- Menggunakan Process Mining Tools untuk memetakan alur proses aktual (as-is process) dibandingkan dengan prosedur ideal (to-be process), sehingga dapat diidentifikasi hambatan dan penyimpangan.
- Melakukan wawancara dengan petugas dan pemohon izin untuk mengidentifikasi kendala non-teknis.

4. Penggunaan Teknologi Digital dalam Deteksi Penyimpangan

- Big Data Analytics: menganalisis ribuan transaksi izin untuk mendeteksi pola abnormal, misalnya izin yang diproses lebih cepat setelah jam kerja.
- Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning: memprediksi potensi keterlambatan atau indikasi fraud berdasarkan pola historis.
- Blockchain atau audit trail digital: memastikan setiap transaksi perizinan terekam secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi.
- Dashboard monitoring real-time: menampilkan indikator kinerja utama (KPI) seperti waktu proses izin, jumlah izin tertunda, dan tingkat kepatuhan unit kerja.

5. Pelaporan Hasil Audit dan Rekomendasi Perbaikan

- Menyusun laporan audit berbasis bukti kuantitatif dan kualitatif.
- Rekomendasi difokuskan pada:
 - Penguatan integrasi sistem antar instansi perizinan.
 - Pengawasan berbasis digital terhadap aktivitas pengguna.
 - Peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan e-Government.
 - Penerapan mekanisme *feedback loop* untuk memperbaiki proses secara berkelanjutan.

6. Tindak Lanjut dan Pemantauan

- Membuat sistem pelaporan otomatis yang memantau pelaksanaan rekomendasi audit.
- Melakukan audit lanjutan setiap periode untuk menilai efektivitas perbaikan yang dilakukan.

Audit kinerja berbasis risiko pada sistem IzinCerdas menempatkan fokus pada area dengan potensi kegagalan tertinggi, yaitu keterlambatan izin, ketidaksinkronan data, dan risiko penyalahgunaan wewenang. Dengan dukungan teknologi digital seperti data analytics, AI, dan dashboard monitoring, auditor dapat mendeteksi penyimpangan secara dini, memverifikasi integritas data, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan good governance, tetapi juga memastikan transformasi digital benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.